



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 62 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Siak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK.

BAB III KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak;
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Perangkat Daerah;
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana. pengawasan dan akuntabilitas;
13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah ASN yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi;
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana;
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan aparatur khususnya penataan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah Aparatur yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan aparatur dalam jabatan yang diperlukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
- a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen calon ASN;
 - c. penempatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. BKPSDMD; dan
 - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;

- e. ikhtisar posisi;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan aparatur yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB IV KEWEMANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan atau pihak lain.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan Fasilitasi Penyusunan terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Siak secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja aparatur sebagai bagian dari formasi dan penempatan aparatur dalam jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 144), Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 150), Peraturan Bupati Siak Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 46), Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Agustus 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Agustus 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 62

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A. Kepala Dinas	1					
	1) Sekretaris		1				
	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama					1	
	2) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	3) JF Pranata SDM Aparatur Penyelia					1	
	4) JF Pranata SDM Aparatur Mahir					1	
	5) JF Pranata SDM Aparatur Terampil					1	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	8) Penata Layanan Operasional				2		
	9) Pengolah Data dan Informasi				3		
	10) Pengelola Layanan Operasional				2		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	12) Operator Layanan Operasional				2		
	2. Kelompok Jabatan						
	1) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					2	
	2) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	3) JF Perencana Ahli Pertama					1	
	4) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama					1	
	5) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	6) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	7) JF Pranata Komputer Penyelia					1	
	8) JF Arsiparis Mahir					1	
	9) Penelaah Teknis Kebijakan				6		
	10) Penata Layanan Operasional				4		
	11) Pengelola Layanan Operasional				2		
	12) Pengolah Data dan Informasi				2		
	13) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	14) Operator Layanan Operasional				4		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kepala Bidang Pengembangan, Perpustakaan, Pemanfaatan Layanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca		1				
	1. Kepala Seksi Pemanfaatan Layanan dan Otomasi Perpustakaan			1			
	1) JF Pustakawan Ahli Muda					5	
	2) JF Pustakawan Ahli Pertama					8	
	3) JF Asisten Perpustakaan Penyelia					1	
	4) JF Asisten Perpustakaan Mahir					3	
	5) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	6) JF Pustakawan Terampil					6	
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	8) Penata Layanan Operasional				3		
	9) Pengolah Data dan Informasi				2		
	10) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	11) Operator Layanan Operasional				10		
	2. Kepala Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Inklusi Sosial Perpustakaan			1			
	1) JF Pustakawan Ahli Muda					5	
	2) JF Pustakawan Ahli Pertama					8	
	3) JF Asisten Perpustakaan Penyelia					2	
	4) JF Asisten Perpustakaan Mahir					3	
	5) JF Arsiparis Mahir					1	
	6) JF Asisten Perpustakaan Terampil					6	
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	8) Penata Layanan Operasional				2		
	9) Pengolah Data dan Informasi				2		
	10) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	11) Operator Layanan Operasional				2		
	3. Kelompok Jabatan						
	1) JF Pustakawan Ahli Muda					5	
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	3) Penata Layanan Operasional				4		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Pengolah Data dan Informasi				2		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	7) Operator Layanan Operasional				2		
	3) Kepala Bidang Pengelolaan, Pemanfaatan Layanan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		1				
	1. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis			1			
	1) JF Arsiparis Ahli Muda					2	
	2) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	3) JF Arsiparis Penyelia					1	
	4) JF Arsiparis Mahir					1	
	5) JF Arsiparis Terampil					1	
	6) Penelaah Teknis Kebijakan				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	7) Pengolah Data dan Informasi				2		
	8) Pengelola Layanan Operasional				2		
	9) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	10) Operator Layanan Operasional				2		
	2. Kepala Seksi Pemanfaatan Layanan dan Teknologi Informasi Kearsipan			1			
	1) JF Arsiparis Ahli Muda					2	
	2) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	3) JF Arsiparis Penyelia					1	
	4) JF Arsiparis Mahir					1	
	5) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	8) Penata Layanan Operasional				3		
	9) Pengelola Layanan Operasional				2		
	10) Pengolah Data dan Informasi				2		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	12) Operator Layanan Operasional				2		
	3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan			1			
	1) JF Arsiparis Ahli Muda					2	
	2) JF Arsiparis Ahli Pertama					2	
	3) JF Arsiparis Penyelia					1	
	4) JF Arsiparis Terampil					1	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	6) Penata Layanan Operasional				3		
	7) Pengolah Data dan Informasi				2		
	8) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	9) Operator Layanan Operasional				2		
	4) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya						
	1) JF Pustakawan Ahli Madya					13	
	2) JF Arsiparis Ahli Madya					7	
	Jumlah	1	3	6	116	108	
	Jumlah Total	234					

BUPATI SIAK,

AFNI. Z